

3.1.3.10. Kesatuan Bangsa

Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.95.319.900.347 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.464.521.241 (98,05%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Urusan tersebut dilaksanakan melalui 6 Program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14	76,8	103,59
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	94,51%	111,18
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	0 kasus	200
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
4.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,5	77,35	112,92
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				

2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator kinerja :

- 1) Konflik di Sumatera Barat (Target Kinerja 3 Kasus) (Realisasi Kinerja : 0 kasus) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

a) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan outcome meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

➤ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 130 orang. Dalam sub kegiatan ini telah terlaksana beberapa kegiatan diantaranya

- Terlaksananya 4 kali rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM bertujuan untuk menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta memberikan laporan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

- Terlaksananya 4 kali rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim ini bertugas mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan yang memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah provinsi.

- Terlaksananya 2 kali rapat Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial (Timdu PKS). Tim ini berfungsi untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial.
 - Terlaksananya 2 kali rapat Tim Pemantauan Orang Asing (POA). Tim ini bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi gubernur dalam mengambil langkah/kebijakan.
 - Tersalurkannya Hibah Kepada POLDA Sumatera Barat, Korem 032/Wirabraja dan KEJATI Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 4 laporan. Pada sub kegiatan ini telah terlaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan permasalahan strategis maupun potensi konflik yang berkembang di tengah masyarakat sehingga terhimpun informasi terkait potensi ATHG, keberadaan orang asing, NGO/lembaga asing maupun data data potensi konflik yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagai acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Provinsi sebanyak 27 dokumen. Pada kegiatan ini terlaksana 27 kali FGD yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait. Kegiatan ini menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan outcome meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. Program tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 335 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 1 kali bimbingan teknis pembaruan kebangsaan, 1 kali pelatihan Peningkatan kesadaran Bela Negara, dan 2 kali Pelatihan Wawasan Kebangsaan untuk Pemilih Pemula
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sebanyak 9730 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali rakor hari bela negara, 1 kali rakor Forum Pembauran Kebangsaan, 1 kali rakor IWKKB, dan Fasilitasi Upacara Pembukaan dan Penutupan Latsitardanus XLIII di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 1 laporan. Pada sub kegiatan ini terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan ideologi dan wawasan kebangsaan di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan outcome terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 4515 orang. Pada sub kegiatan ini, terlaksana 9 kali Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi pelajar dan generasi muda dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 30 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan 1 kali Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN. Forum Kerukunan Umat Beragama bertujuan menampung informasi terkait permasalahan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Adapun Tim Terpadu

P4GN bertujuan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I. Untuk mencapai target kinerja sasaran I yaitu konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (Target Kinerja 68,5) (Realiasi Kinerja : 77,35) dengan capaian kinerja 112,92

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan outcome terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 13.477 orang. Pada sub kegiatan ini telah terlaksana 120 kali pendidikan politik bagi tokoh masyarakat di Sumatera Barat, fasilitasi terhadap proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, fasilitasi terhadap pencairan bantuan keuangan bagi 9 partai politik, dan fasilitasi penyaluran bantuan Hibah KPU dan Bawaslu terkait Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sebanyak 50 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 1 kali rapat tim pemantauan perkembangan politik daerah dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait

perkembangan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat.

b) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan outcome terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 750 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 6 kali sosialisasi dan pembinaan ormas di daerah dengan tujuan agar aktivitas yang dilakukan oleh ormas di daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 50 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait keberadaan dan aktivitas ormas yang ada di daerah.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat khususnya indikator yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Membentuk Pokja IDI yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-337-2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pokja ini beranggotakan Kanwil Hukum dan HAM

Prov Sumbar, Kementerian Agama Prov Sumbar, BPN Prov Sumbar, BIN Sumbar, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Badan Pusat Statistik, Polda Sumbar, KPU Prov. Sumbar, Bawaslu Prov. Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, MUI, Universitas Andalas dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tugasnya adalah memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.

2. Melaksanakan pendidikan politik bagi 13.477 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, ninik mamak, bundo kanduang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam politik sehingga dapat mengungkit salah satu indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan politik di Sumatera Barat dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah Nomor 200-338-2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023. Tim ini beranggotakan Kapolda, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud, KPU Provinsi, BIN Daerah Sumbar, Bawaslu Provinsi Sumbar dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja 74,14) (Realiasi Kinerja : 76,8) dengan capaian kinerja 103,59%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen yang terdiri dari dokumen Renja Perangkat Daerah dan Renja Perubahan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 22 dokumen diantaranya dokumen Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, Laporan Akhir Tahun, Laporan Evaluasi Renja per triwulan, Laporan Realisasi Fisik Keuangan per bulan, dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan dokumen RB.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 37 orang ASN di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan honor sebanyak 8 orang ASN yaitu honor pejabat pengelola keuangan (PA, PPTK, Bendahara, dan PPK)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan sebanyak 18 dokumen yaitu LRA per bulan, laporan neraca, laporan semesteran, laporan tahunan, dll.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III. Untuk mencapai target kinerja sasaran III (nilai akuntabilitas kinerja OPD), terdapat beberapa upaya

yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikasinya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
5. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.

d. Sasaran IV : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja 85%) (Realiasi Kinerja : 94,51%) dengan capaian kinerja 111,18%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah BMD yang diasuransikan sebanyak 5 unit yaitu kendaraan dinas pimpinan 1 unit dan kendaraan dinas operasional sebanyak 4 unit.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen (per bulan)

(2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah

aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk outbond dengan peserta sebanyak 37 orang.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang diikuti sebanyak 3 kali bimtek diantaranya bimtek tentang inovasi, perencanaan dan bimtek bagi operator website.

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak diantaranya baterai, kabel raund, lampu listik, isolasi, dll.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output kegiatan ini adalah jumlah AC split yang disediakan yaitu sebanyak 2 unit.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan diantaranya ATK, kertas dan cover, bahan cetak, bahan computer dan makan minum tamu.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan diantaranya banner informasi, spanduk, baliho, cetak amplop, cetak map, cetak kwitansi, biaya penjilidan dan fotocopy.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat kabar yang disediakan sebanyak 144 eksemplar yang terdiri dari Padang Ekspres, Pos Metro, Kompas, Rakyat Sumbar dan Singgalang
- Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, output kegiatan ini adalah jumlah mebel dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel, dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel sebanyak 34 unit yang terdiri dari 2 unit lemari arsip, 14 unit kursi kerja pegawai non struktural, 10 unit meja kerja pegawai non struktural, dan 8 unit kursi kerja Eselon IV.

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya baru sebanyak 3 unit yang terdiri dari 1 unit laptop dan 2 unit printer.
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kapasitas tagihan internet, telfon, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah tenaga pelayanan kantor yang tersedia yang terdiri dari 3 orang tenaga kebersihan, 4 orang tenaga keamanan dan 4 orang tenaga sopir.
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yaitu 1 unit kendaraan dinas pimpinan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 7 unit yang terdiri dari 5 unit kendaraan dinas operasional (2 unit innova, 1 unit APV, 1 unit Ford Everest dan 1 unit Panther) dan 2 unit kendaraan bermotor.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 39 unit yang terdiri dari 15 unit pemeliharaan AC, 12 unit pemeliharaan notebook/laptop dan 12 unit pemeliharaan printer.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang

dipelihara/direhab berupa pembuatan sarana disabilitas, rehab musholla dan ruangan resepsionis.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya penerbitan surat keterangan keberdaaan ormas, bantuan keuangan partai politik, pemberian hibah uang dan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk lebih mencapai target kinerja sasaran IV (tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi) diantaranya :

1. Penyediaan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan pemeberian layanan kepada masyarakat.
4. Menciptakan layanan berbasis IT untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100%	8.218.788.652	8.019.964.029	97,58
1I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100%	87.737.200	87.125.770	99,3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun)	100	71.515.900	71.057.570	99,36

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 dokumen (Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun)	22 dokumen (Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun)	100	16.221.300	16.068.200	99.06
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	100	5.247.011.042	5.148.385.628	98.12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	100	5.097.953.542	4.999.331.128	98.07
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	9 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	100	143.940.000	143.940.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disiapkan)	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disiapkan)	100	5.117.500	5.114.500	99.94
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	100	31.155.000	31.145.000	99.97
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit (Jumlah BMD yang diasuransikan)	5 unit Jumlah BMD yang diasuransikan)	100	27.417.800	27.417.800	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen (Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah)	12 dokumen (Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah)	100	3.737.200	3.727.200	99,73
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	70% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	100	36.692.000	36.612.000	99.78
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39 orang (Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	39 orang (Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	100	18.430.000	18.395.000	99.81

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 kali (Jumlah Bimtek yang diikuti)	3 kali (Jumlah Bimtek yang diikuti)	100	18.262.000	18.217.800	99,75
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	100	1.837.917.376	1.751.554.204	95,3
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	10 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	100	9.248.000	9.240.400	99,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	7 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	100	50.740.500	50.563.300	99,65
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)	100	38.121.000	38.094.350	99,93
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	144 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	144 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	100	16.080.000	16.080.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	100	1.712.327.876	1.626.176.154	94,97
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 unit (Jumlah AC Split yang disediakan)	2 unit (Jumlah AC Split yang disediakan)	100	11.400.000	11.400.000	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	100	107.572.780	105.221.000	97,81
	Pengadaan Mebel	33 unit (Jumlah mebel)	33 unit (Jumlah mebel)	100	75.368.600	73.421.000	97,42
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	3 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	100	32.204.180	31.800.000	98,74
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	100	569.522.254	560.825.895	98,47
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	150 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100	10.355.000	10.354.400	99,99

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 450 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 48.000 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	12 bulan (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 450 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 48.000 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan))	100	79.200.000	75.622.091	95.48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	100	479.967.254	474.849.404	98.93
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	100	301.181.000	299.094.532	99.31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	100	26.000.000	25.802.883	99.24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit (Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara)	1 unit (Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara)	100	131.947.000	130.833.838	99.16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 unit (Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)	39 unit (Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)	100	26.190.000	26.168.400	99.92
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	100	117.044.000	116.289.411	99.36
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	2.72 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	100	4.321.930.349	4.287.167.978	99.2

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	KARAKTER KEBANGSAAN						
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)	100	4.321.930.349	4.287.167.978	99.2
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	335 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	335 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	100	479.765.500	470.247.850	98.02
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9730 orang (Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	9730 orang (Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	100	3.784.376.349	3.760.148.628	99.36
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan (Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	1 laporan (Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	100	57.788.500	56.771.500	98.24

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				
III	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,28 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	3,28 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	100	74.474.255.189	73.407.446.604	98.57
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)	100	6.534.139.200	6.413.184.503	98.15
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.477 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	13.477 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	100	74.434.835.189	73.368.026.604	98.57

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	50 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	100	39.420.000	39.420.000	100
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Masyarakat	100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100	1.032.674.575	979.954.050	94.89
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat)	100	1.032.674.575	979.954.050	94.89
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	750 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	100	950.000.000	907.167.400	95.49

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	50 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	100	36.927.775	32.217.550	87.24
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	1 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	100	45.746.800	40.569.100	88.68
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	3.11 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	3.11 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	100	2.215.156.650	2.141.149.310	96.66
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100	2.215.156.650	2.141.149.310	96.66
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	4515 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	4515 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	100	2.119.860.000	2.049.604.710	96.69

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	30 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	100	95.296.650	91.544.600	96.06
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.02 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	3.02 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	100	5.057.094.932	4.628.839.270	91.53
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100	5.057.094.932	4.628.839.270	91.53
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	130 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	130 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	100	3.385.100.000	3.378.912.982	99.82

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	4 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	100	182.264.332	180.326.403	98.94
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	27 dokumen (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi)	27 dokumen (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi)	100	1.489.730.600	1.069.599.885	71.8

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan penanganan konflik di daerah. 2. Belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di daerah 3. Belum optimalnya fungsi Puskominfo (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait regulasi yang berkaitan dengan penanganan konflik 2. Memaksimalkan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Mengoptimalkan fungsi Puskominfo baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota guna memperoleh informasi yang cepat dan akurat terkait permasalahan yang ada di daerah 	-
II	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan khususnya bagi pemilih pemula dan generasi muda	
III	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum terdatanya seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat	Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Ormas (Siormas) untuk menginventarisasi data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan tentang ormas	
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat	Pelaksanaan Sosialisasi P4GN khususnya bagi pelajar dan generasi muda secara berkesinambungan, pembentukan tim terpadu P4GN dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang melibatkan instansi terkait	
V	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat Permendagri. 2. Belum terbentuknya tim dan forum strategis daerah untuk penguatan Ideologi Pancasila di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Mendorong Kabupaten/Kota membentuk tim dan forum strategis daerah yang diamanatkan Permendagri untuk penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	